



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

RENJA DITJEN PHPL TAHUN 2019

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PHPL
JAKARTA, NOVEMBER 2018



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : SK. 43/PHPL/SET/REN.0/11/2018

TENTANG
RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018, telah ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019;
 - b. bahwa RENJA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 sebagaimana huruf a, perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) setiap unit kerja Eselon I sebagai acuan pembangunan hutan produksi serta acuan penyusunan Renja Eselon II dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - c. bahwa sehubungan butir a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2017 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42/Menhut-II/2010 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 39/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.11/PHPL-SET/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2019**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2019, selanjutnya disebut dengan RENJA Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2019, disusun sebagai acuan bagi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari maupun Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan untuk periode tahun 2019.
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun Anggaran 2019.
- c. Pengendalian kegiatan pembangunan lingkup Direktorat Jenderal PHPL untuk periode Tahun 2019.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 November 2018



DIREKTUR JENDERAL,

Dr. HILMAN NUGROHO
NIP. 19590615 198603 1 004

Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK. 43/PHPL/SET/REN.0/11/2018
Tanggal : 1 November 2018

TENTANG
RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Pengelolaan hutan produksi sejatinya mampu menjaga kelestarian hutan dan membawa masyarakat menuju kesejahteraan. Ditjen PHPL memiliki karakteristik peran tersendiri dalam pengelolaan hutan produksi. Ditjen PHPL dituntut mampu menciptakan kondisi pemungkin melalui norma, standard, pedoman dan kriteria yang dibangun guna menciptakan kondusifitas iklim usaha pada hutan produksi. Mengolah pengetahuan (knowlwdge) menjadi kearifan (wisdom) melalui kebijakan-kebijakan yang mampu mensejahterakan masyarakat dan berkelanjutan

Rencana kerja Tahun 2019 merupakan tahun kelima atau terakhir dari Renstra Ditjen PHPL dan RPJMN 2015 – 2019. Hasil pembangunan hutan produksi ini akan menjadi landasan dalam pengelolaan hutan produksi periode 2020 – 2024. Sebuah periode penuh tantangan sejalan dengan terbukanya gerbang Revolusi Industri 4.0. Sebuah era yang menuntut konvergensi, sinergitas, dan konektifitas teknologi, informasi dan komunikasi.

Global Competitiveness report tahun 2017 mencatat posisi daya saing indonesia berada di peringkat 36 dari 100 negara, naik 5 peringkat dari tahun sebelumnya. Daya saing ini perlu terus ditingkatkan, terus dilakukan perubahan-perubahan secara sistematis dan strategis untuk mampu berkompetisi di dunia global. Sebagai unsur pemerintah, Ditjen PHPL terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan menuju era keterbukaan dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah, swasta dan masyarakat harus mampu bekerja cerdas, ikhlas dan sinergis untuk mampu menjadikan sektor industri kehutanan tumbuh dan berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.

Diharapkan Rencana Kerja ini mampu mengarahkan para pihak memiliki "vektor" yang sama, saling bahu membahu berkontribusi positif sesuai perannya masing masing dalam mensukseskan Program-program Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Ditjen PHPL.

Jakarta, November 2018

DIREKTUR JENDERAL,



Dr. Hilman Nugroho

NIP.19590615 198603 1 004

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	7
II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018.....	13
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018.....	13
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018.....	18
III. RENCANA KERJA TAHUN 2019	20
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional tahun 2019.....	23
B. Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019 ...	30
IV. PENUTUP.....	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sumber Daya Manusia Satker Pusat Ditjen PHPL.....	10
Tabel 2.	Sumber Daya Manusia Satker UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI	11
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2017.....	14
Tabel 4.	Realisasi PNBPN tahun 2015, 2016 dan 2017	14
Tabel 5.	Realisasi Nilai Ekspor tahun 2015, 2016 dan 2017.....	16
Tabel 6.	Perbandingan Ekspor berdasarkan kawasan tahun 2015, 2016 dan 2017	16
Tabel 7.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat yang menjadi Mitra KPHP	17
Tabel 8.	Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2017	18
Tabel 9.	Kegiatan Ditjen PHPL yang Mendukung Kegiatan Tematik	20
Tabel 10.	Kontribusi Direktorat Jenderal PHPL terhadap Prioritas Nasional Tahun 2019	21
Tabel 11.	Alokasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional Ditjen PHPL TA 2019	29
Tabel 12.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2019.....	30
Tabel 13.	Sindikator Kinerja Utama Ditjen PHPL Tahun 2019	31
Tabel 14.	Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.....	32
Tabel 15.	Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan usaha Hutan Produksi	33
Tabel 16.	Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK	34
Tabel 17.	Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan dan luran Kehutanan	35
Tabel 18.	Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	36
Tabel 19.	Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.....	37
Tabel 20.	Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan.....	38
Tabel 21.	Alokasi Pagu Anggaran Ditjen PHPL per Kegiatan TA 2019	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Azas Pengelolaan Hutan dan Kehutanan	2
Gambar 2. Alokasi pengelolaan Hutan Produksi	4
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.....	8
Gambar 4. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Jean-Claude Juncker (Presiden EC)	17
Gambar 5. Ekspor perdana produk kayu berlisensi FLEGT.....	18
Gambar 6. Soundbite Ditjen PHPL.....	20



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan dengan azas manfaat lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan seluas ± 120 juta hektar dan 68,85 juta hektar merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan produksi.

Pendekatan pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek meliputi aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Keberhasilan pengelolaan hutan produksi dari aspek ekonomi dipresentasikan oleh sistem produksi hasil hutan yang mampu mempertahankan potensi sumber daya hutan yang stabil dengan nilai ekonomi dan finansial yang selalu berkembang bagi keseluruhan pelakunya (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Dari aspek ekologi ditunjukkan oleh kualitas sistem konservasi fungsi hutan untuk perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan. Sementara aspek sosial menuntut adanya interaksi

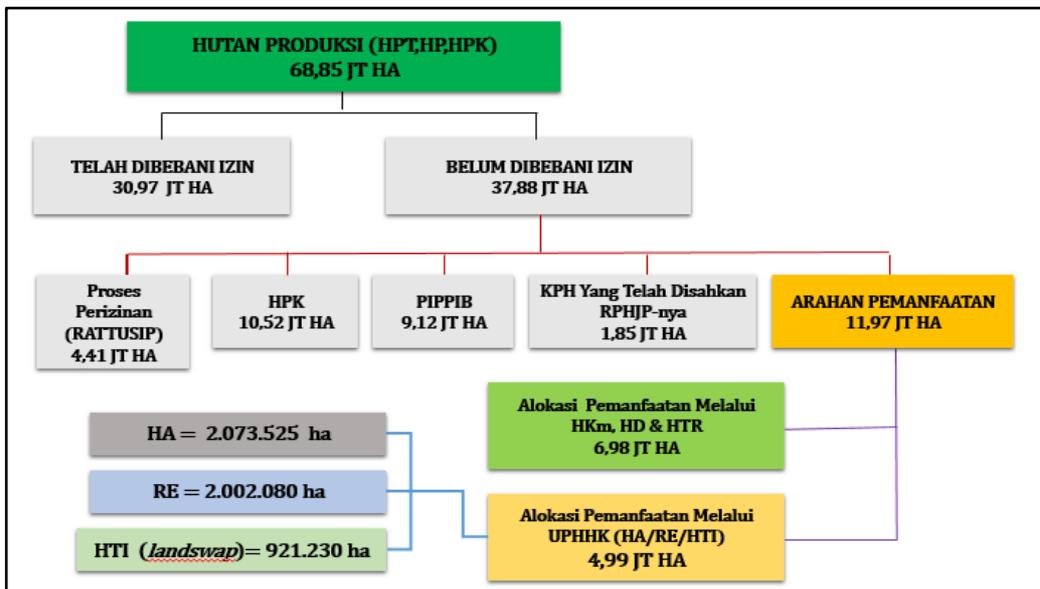


Gambar 1. Azas pengelolaan hutan dan kehutanan

positif keberadaan pengelolaan hutan dalam kerangka perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan.

Kawasan hutan produksi seluas 68,85 juta hektar, saat ini telah dikelola melalui mekanisme perizinan seluas 30,97 juta ha antara lain diberikan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 19,44 juta ha, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas 10,91 juta ha, dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 0,62 juta ha. Selain mekanisme perizinan tersebut, juga terdapat izin usaha lainnya berupa pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 196,29 ribu ha, Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan penyimpanan Karbon (IUP Rap Pan Karbon) seluas 48,09 ribu Ha, IUPK-Silvo Pastura seluas 616 Ha, IUPHHBK seluas 301,17 ribu Ha, Penetapan Areal HKm/HD seluas 115,15 ribu Ha.

sistem perizinan yang telah ada sejak tahun 1970 perlu untuk terus ditingkatkan kinerjanya demi kelestarian hutan produksi. Berbagai kebijakan telah digulirkan untuk mendorong investasi dan usaha pemanfaatan hutan produksi. Multisistem Silvikultur, Reduce Impact Logging, Silvikultur Intensif terus dikembangkan dengan menggandeng Badan Penelitian dan pengembangan KLHK maupun akademisi di berbagai belahan nusantara. Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi pengelolaan hutan produksi, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan secara online (SI-PUHH) terus dikembangkan sebagai upaya peningkatan pelayanan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan.



Gambar 2. Alokasi Pengelolaan hutan produksi

Upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan dilakukan melalui pembukaan akses usaha kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi. Pengelolaan hutan produksi sesuai amanat UU 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, diupayakan dengan mendorong terbentuk dan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi bersama masyarakat melalui mekanisme kemitraan, kerjasama maupun ijin Usaha pemanfaatan. Melalui kemitraan dan kerjasama, Masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan bukan lagi sebagai objek pembangunan hutan produksi, melainkan ditempatkan sebagai subjek pembangunan hutan produksi.

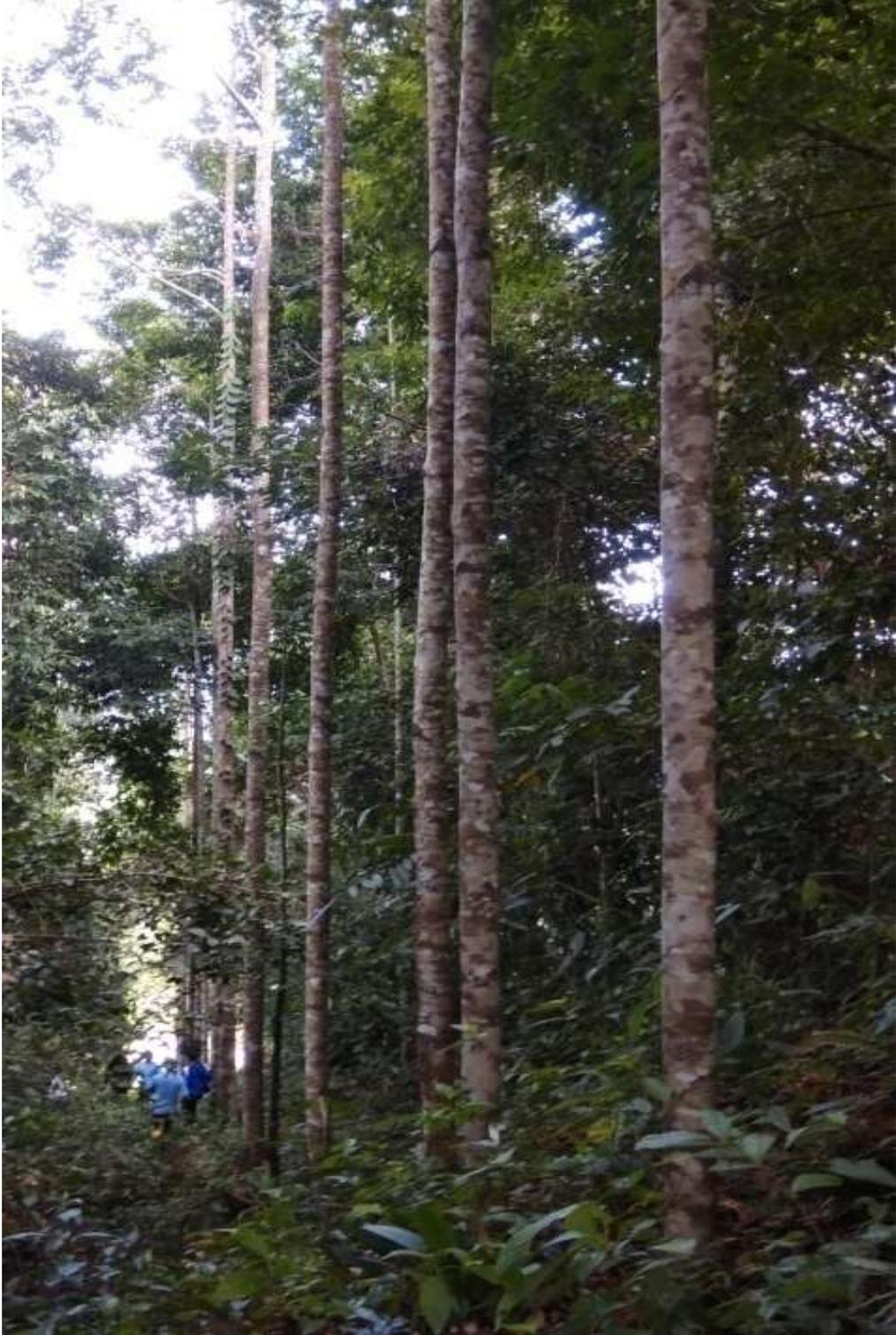
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal PHPL merupakan Unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen PHPL disertai tugas untuk mengurus Hutan produksi. Penyelenggaraan kehutanan dibidang hutan produksi, sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Dalam pelaksanaannya, pengurusan hutan produksi saat ini mengutamakan keberpihakan kepada rakyat banyak yang merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Direktorat Jenderal PHPL, sebagai unsur organik Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal PHPL menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,



- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

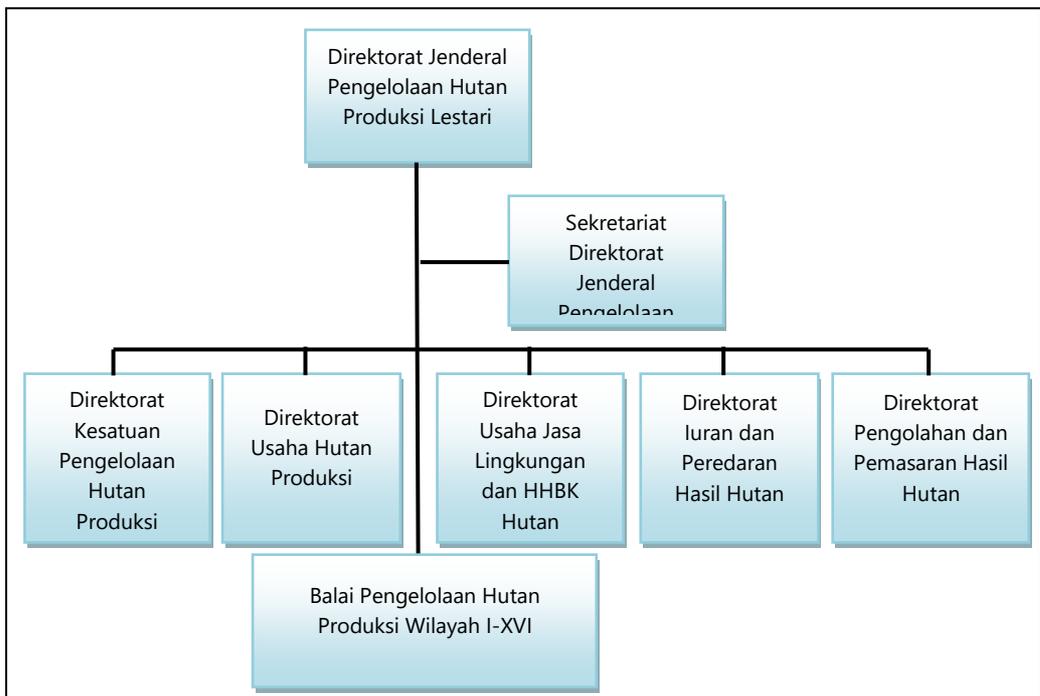
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen PHPL didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari :

1. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
2. Direktorat Usaha Hutan Produksi;

3. Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi;
4. Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan;
5. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PHPL sebagaimana gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen PHPL didukung oleh 1.020 orang pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut tersebar ke dalam 6 Unit Eselon II (338 pegawai) dan 16 Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI (682 pegawai). Sumber daya manusia Ditjen PHPL yang cukup besar terus didorong untuk meningkatkan kemampuan, baik dari sisi akademik maupun kompetensi teknis dan manajerial.

SDM Pusat pada 6 Eselon 2 Pusat (1 Sekretariat Ditjen dan 5

Direktorat) terdiri dari 308 PNS dan 30 tenaga kontrak. Dari sisi pendidikan, Ditjen PHPL diperkuat oleh 5 pegawai berpendidikan Doktor (S3), 93 orang pegawai berpendidikan Master (S2), 131 orang pegawai berpendidikan Sarjana (S1), dan 109 orang pegawai berpendidikan D3 atau SLTA kebawah. Sumber daya manusia pusat disajikan pada tabel 1.

SDM UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I s.d. XVI terdiri dari 560 PNS dan 122 tenaga kontrak. Dari sisi pendidikan, UPT BPHP diperkuat oleh 113 orang pegawai berpendidikan Master (S2), 295 orang pegawai berpendidikan Sarjana (S1), dan 274 orang pegawai berpendidikan D3 atau SLTA kebawah. Sumber daya manusia pusat disajikan pada tabel 2.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Satker Pusat Ditjen PHPL

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL														JMH PNS	TENAGA KONTRAK				TOTAL
		KEHUTANAN						NON KEHUTANAN									SLTA	SLTP	SD	JMH	
		S3	S2	S1	SM	SKMA	JMH	S3	S2	S1	SM	SLTA	SLTP	SD	JMH						
1	SETDITJEN	1	4	10	4	2	21	1	9	25	6	7	1	1	50	71	12	0	-	12	83
2	DIT. KPHP	0	6	12	1	1	20	0	15	4	2	7	0	0	28	48	2	0	0	2	50
3	DIT. UHP	1	5	17	2	1	26	0	10	8	1	5	0	0	24	50	5	0	0	5	55
4	DIT. UJLHHBK	1	5	15	0	1	22	0	6	5	1	10	0	2	24	46	1	0	1	2	48
5	DIT. IPHH	0	2	9	1	2	14	0	15	8	4	5	0	0	32	46	4	0	0	4	50
6	DIT. PPHH	1	4	13	1	1	20	0	12	5	4	5	0	1	27	47	4	0	1	5	52
JUMLAH		4	26	76	9	8	123	1	67	55	18	39	1	4	185	308	28	0	2	30	338

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Satker UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											JMH PNS	TENAGA KONTRAK						TOTAL	
		KEHUTANAN						NON KEHUTANAN						S1	SM	SLTA	SLTP	SD	JMH		
		S3	S2	S1	SM	SKMA	JMH	S2	S1	SM	SLTA	SLTP									JMH
1	BPHP I	-	3	7	-	-	10	5	10	2	2	-	19	29	-	-	3	-	-	3	32
2	BPHP II	-	2	8	-	2	12	4	9	2	5	-	20	32	-	-	7	-	-	7	39
3	BPHP III	-	1	11	-	2	14	8	7	1	5	-	21	35	1	-	9	-	-	10	45
4	BPHP IV	-	2	7	1	2	12	5	11	1	12	1	30	42	-	1	10	-	-	11	53
5	BPHP V	-	1	8	-	-	9	9	4	4	7	-	24	33	1	-	6	-	-	7	40
6	BPHP VI	-	-	13	2	3	18	6	9	3	8	-	26	44	-	-	8	-	-	8	52
7	BPHP VII	-	1	12	-	2	15	5	7	1	2	-	15	30	-	-	7	-	-	7	37
8	BPHP VIII	-	-	10	-	8	18	3	9	-	9	-	21	39	-	-	3	-	1	4	43
9	BPHP IX	-	4	14	1	1	20	3	9	-	6	-	18	38	5	-	3	1	-	9	47
10	BPHP X	-	4	12	-	3	19	5	4	2	6	-	17	36	2	1	8	-	-	11	47

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											JMH PNS	TENAGA KONTRAK						TOTAL	
		KEHUTANAN						NON KEHUTANAN						S1	SM	SLTA	SLTP	SD	JMH		
		S3	S2	S1	SM	SKMA	JMH	S2	S1	SM	SLTA	SLTP									JMH
11	BPHP XI	-	1	25	-	4	30	4	3	-	8	2	17	47	-	-	8	-	-	8	55
12	BPHP XII	-	5	8	1	1	15	2	5	-	9	-	16	31	1	-	5	-	-	6	37
13	BPHP XIII	-	5	16	-	6	27	10	6	2	3	-	21	48	2	-	5	-	-	7	55
14	BPHP XIV	-	2	12	1	2	17	2	3	1	7	-	13	30	5	1	2	-	-	8	38
15	BPHP XV	-	3	2	1	4	10	2	3	-	5	-	10	20	3	-	5	1	-	9	29
16	BPHP XVI	-	5	6	2	3	16	1	5	3	1	-	10	26	-	-	6	1	-	7	33
JUMLAH		0	39	171	9	43	262	74	104	22	95	3	298	560	20	3	95	3	1	122	682

II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PHPL memiliki 4 (empat) Sasaran Program yaitu:

1. Meningkatnya sumbangan PNBP dari Hutan Produksi (termasuk industri);
2. Meningkatnya nilai ekspor industri hasil hutan;
3. Meningkatnya kerjasama KPHP dalam memproduksi barang dan jasa;
4. Menurunnya luas areal kebakaran hutan produksi;

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Jumlah PNBP dari hutan produksi;
2. Nilai ekspor produk industri kehutanan;
3. Jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi;
4. Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran;

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil bahwa capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL rata-rata sebesar 109,02%. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, program yang dilaksanakan oleh Ditjen PHPL telah mencapai target/tujuan yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil dari komitmen Ditjen PHPL pada tahun 2017 untuk meningkatkan kinerjamelalui tiga pilar kebijakan dalam pemanfaatan hutan produksi, yaitu tata kelola yang tepat, pelayanan cepat dan pengendalian cermat. Capaian kinerja program Ditjen PHPL selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017			Prognosis Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya sumbangan PNBP dari Hutan Produksi (termasuk industri)	Jumlah PNBP dari hutan produksi	2,796 T	2,822 T	100,93	2,96	2,96	100
Meningkatnya nilai ekspor industri hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri kehutanan	8,03 M USD	10,98 MUSD	136,74	8,64	11,00	127,31
Meningkatnya kerja sama KPHP dalam memproduksi barang dan jasa	Jumlah KPHP yang melakukan kerja sama pengelolaan hutan produksi	63 KPHP	62 KPHP	98,41	89	89,	100
Menurunnya luas areal kebakaran hutan produksi	Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	53 KPHP	53 KPHP	100,00	92	92	100
Rata-rata		109,02					

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Sumbangan PNBP dari Hutan Produksi (termasuk Industri)

Indikator Kinerja Program untuk sasaran strategis pertama yaitu jumlah PNBP dari hutan produksi. Pada tahun 2017, target PNBP sebesar Rp. 2,796 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 2,822 Triliun (100,93%). Jika dibandingkan dengan target Renstra (2015-2019) sebesar Rp. 3,127 Triliun, realisasi PNBP tahun 2017 telah mencapai 90,25%.

Tabel 4. Realisasi PNBP Tahun 2015, 2016 dan 2017

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Tahun 2015 (Rupiah)	Tahun 2016 (Rupiah)	Tahun 2017 (Rupiah)
a. PSDH	1.012.830.957.193	827.046.155.417	917.669.361.849
b. DR	1.879.058.754.798	1.617.922.550.561	1.712.914.087.182
c. IIUPHHK-HA/HT dgn THPB, IIUPHHBK HA dan IIPHHK RE	57.312.538.190	128.671.789.122	41.285.180.843
d. Ganti Rugi Tegakan	0	0	19.791.592.836
e. Penggantian Nilai Tegakan	523.374.564.192	44.620.626.945	0
f. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)	70.187.190.630	52.499.467.249	130.705.529.408
Jumlah	3.542.764.005.003	2.670.760.589.294,96	2.822.365.752.118

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari PSDH, DR dan IIUPHH di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 (yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenLHK-Setjen/2015), tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan juga mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan melalui SIMPONI.

Untuk meningkatkan PNBP, Ditjen PHPL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*, dengan meluncurkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP). Dengan SIPNBP, Wajib Bayar dapat segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi. Pada saat Wajib Bayar melakukan transaksi, pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya.

SIPNBP merupakan sistem informasi PNBP Sumber Daya Alam pertama yang terintegrasi dengan SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan. Keberhasilan meningkatkan sumbangan PNBP juga tidak terlepas dari peran SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) yang sudah terintegrasi dengan SIPNBP. Saat ini SIPUHH telah menjadi sarana utama pelayanan publik bidang penatausahaan hasil hutan yang berlangsung 24 jam penuh, memfasilitasi lebih dari 3.000 pelaku usaha yang terkait pemanfaatan hasil hutan, simpul distribusi dan industri primer pengolahan kayu.

Dalam kegiatan tersebut, SIPUHH memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia telah memiliki inovasi-inovasi yang kreatif antara lain dalam tata kelola kehutanan. Konferensi dimaksudkan untuk menyoroti wawasan-wawasan yang didapatkan melalui hasil kerja OPSI (*Observatory Public Service Innovation*) bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), dalam mengubah cara mereka beroperasi dan memperbaiki kehidupan masyarakat di negaranya melalui inovasi.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Nilai Ekspor Industri Hasil Hutan Kayu

Target ekspor produk industri kehutanan tahun 2017 sebesar USD 8,03 Miliar, dengan realisasi sebesar USD 10,98 Miliar (136,74%). Dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019 sebesar USD 40,37 Miliar, realisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar USD 29,87 Miliar telah mencapai 73,99%. Rincian nilai ekspor produk industri kehutanan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Nilai Ekspor Tahun 2015, 2016 dan 2017

Ekspor Industri		2015 (USD)	2016 (USD)	2017 (USD)
1	Wood Chip (Serpih kayu)	158.266.877,82	110.952.464,41	91.020.258,61
2	Furniture kayu	1.095.737.363,47	862.783.803,73	1.387.765.952,77
3	Kerajinan	89.007.148,15	66.750.824,99	79.704.952,77
4	Panel	2.582.822.987,23	2.460.468.307,88	2.467.469.902,23
5	Paper	3.162.936.881,54	3.117.149.989,94	3.464.042.099,20
6	Pulp	1.777.902.392,47	1.620.210.530,10	2.365.863.945,49
7	Veneer	39.639.576,63	54.302.143,09	77.530.800,47
8	Woodworking	929.354.796,17	971.857.326,38	1.046.571.903,11
9	Bangunan Prefabrikasi	6.035.626,11	3.593.631,49	3.330.657,82
Jumlah		9.841.703.649,59	9.268.069.022,01	10.983.300.472,47

(sumber data : Download SILK Online 21 Januari 2018)

Berdasarkan kawasan negara tujuan, nilai ekspor produk industri kehutanan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2015, 2016 dan 2017

Kawasan Negara	2015 (USD)	2016 (USD)	2017 (USD)
Asia	6.901.930.560,23	6.601.526.154,99	7.827.745.371,11
North America	1.241.952.760,45	996.085.059,15	1.297.171.112,10
European Union	873.247.810,24	869.982.533,76	1.013.951.421,66
Oceania	409.286.450,10	408.897.707,38	439.284.065,32
Africa	315.087.486,10	306.739.041,95	332.658.234,55
South America	71.760.799,03	53.684.036,38	42.010.817,65
Europe	28.435.768,44	31.152.472,40	30.479.450,08
Jumlah	9.841.703.649,59	9.268.069.022,01	10.983.300.472,47

(sumber data : Download SILK Online 21 Januari 2018)

Tingginya capaian kinerja nilai ekspor produk industri kehutanan berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan, dimana terdapat produk industri kehutanan yang sebelumnya termasuk dalam kelompok B (tidak wajib dilengkapi dokumen V-Legal), maka mulai tanggal 15 Mei 2017 termasuk dalam kelompok A (wajib dilengkapi dokumen V-

Legal). Kerjasama Indonesia dengan komunitas negara yang tergabung dalam Uni Eropa mencapai puncaknya dengan diberlakukannya FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) License pada tanggal 15 November 2016 yang ditandai dengan kegiatan *first shipment* ke negara anggota Uni Eropa. Dokumen V-Legal/dokumen FLEGT yang diterbitkan oleh LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) dikirimkan melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikelola Ditjen PHPL. Dengan adanya SILK, diharapkan kegiatan ekspor produk industri kehutanan yang bersertifikat semakin meningkat.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kerjasama KPHP dalam Memproduksi Barang dan Jasa

Target jumlah unit KPHP yang melakukan kerjasama dalam memproduksi barang dan jasa adalah 63 unit KPHP dengan realisasi sebesar 62 unit KPHP (98,41%). Berdasarkan Rencana Kerja Ditjen PHPL tahun 2017, indikator kinerja jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi baru ditargetkan pada tahun 2017, dan capaian pada tahun 2017 (62 unit) adalah sebesar 46,62 % dibandingkan target sampai dengan tahun 2019 (133 unit).

Hasil olah data kemandirian KPHP oleh Direktorat KPHP terhadap 40 (empat puluh) KPHP, menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat/Kepala Keluarga (KK) yang menjadi mitra KPHP, sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Peningkatan Pendapatan Masyarakat yang Menjadi Mitra KPHP (40 KPHP)

No	Indikator	Tahun	2015	2016	2017
1	Perubahan Jumlah KK Mandiri yang Melakukan Usaha HHBK/Jasling	Jumlah	29.431	29.820	29.693
		% perubahan	0	1,32	0,89
2	Perubahan Jumlah KK yang Bekerjasama dengan Masyarakat dalam melakukan Usaha HHBK/Jasling	Jumlah	4.487	8.808	10.706
		% perubahan	0,00	96,30	138,60
3	Perubahan Jumlah KK yang Bekerjasama dengan Investor dalam Melakukan Usaha HHBK/Jasling	Jumlah	155	889	2.267
		% perubahan	0	473,55	1.362,58
4	Perubahan Pendapatan KK Perbulan Hasil Kerjasama	Jumlah	26.250.000	44.750.000	76.650.000
		% perubahan	0,00	70,48	192,00

*) Survei dilaksanakan pada bulan September 2017

Sasaran Kegiatan 4 : Menurunnya Luas Areal Kebakaran Hutan Produksi

Pencegahan bahaya kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu penyebab tingginya degradasi hutan dan lahan, merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen PHPL bertanggung jawab mencegah kebakaran di wilayah hutan produksi, yang dalam pelaksanaannya melibatkan pengelola di tingkat tapak (KPHP).

Target jumlah unit KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran adalah 53 unit KPHP dengan realisasi sebanyak 53 unit KPHP (100 %), pada 6 (enam) provinsi (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua). Berdasarkan Rencana Kerja Ditjen PHPL tahun 2017, indikator kinerja jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran baru ditargetkan pada tahun 2017, dan capaian pada tahun 2017 (53 unit) adalah sebesar 51,96 % dibandingkan target sampai dengan tahun 2019 (102 unit).

Selama kurun waktu 2015-2017, jumlah hotspot menurun cukup signifikan, yaitu dari 21.929 titik di tahun 2015, 3.915 titik di tahun 2016, hingga 2.581 titik di tahun 2017 (satelit NOAA). Begitu pula dengan data satelit Terra/Aqua (NASA) confidence level >80%, menunjukkan penurunan dari 70.971 titik di tahun 2015, 3.844 titik di tahun 2016, dan 2.440 titik di tahun 2017, seperti ditunjukkan dalam Gambar 19. Secara umum di tahun 2017, kurang lebih 35% jumlah hotspot menurun dari tahun 2016, dan sekitar 16,99% diantaranya terjadi di hutan produksi yang dikelola oleh KPHP.

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

Pagu anggaran APBNP Ditjen PHPL tahun 2017 adalah sebesar Rp.448.654.987.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.400.467.306.582,- (89,26%). Dengan capaian kinerja sebesar 109,02%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja program Ditjen PHPL sebesar 0,82 (rasio input : output = 89,26/109,02) termasuk kategori efisien (nilai efisiensi < 1).

Tabel 8. Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2017

Kegiatan	Capaian 2017			Prognosis 2018		
	Pagu (Rp.000,-)	Realisasi (Rp,000-)	(%)	Pagu (Rp.000,-)	Realisasi (Rp,000-)	(%)
5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari	47.786.000	46.830.280	98	53.804.467	53.750.662	99
5397 Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	9.592.482	9.122.857	95	11.392.568	11.375.479	99
5398 Peningkatan Usaha Hutan Produksi	6.532.000	6.205.400	95	9.333.046	9.318.113	99
5399 Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan luran Kehutanan	5.515.000	5.404.700	98	4.542.000	4.800.140	99
5400 Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	4.948.000	4.849.040	98	12.415.000	4.505.664	99
5401 Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	6.415.000	6.094.250	95	4.817.000	12.297.057	99
5402 Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	367.866.505	294.293.204	80	311.387.283	306.967.529	98
Jumlah	448.654.987	372.789.731	83	407.691.364	403.945.274	99

III. RENCANA KERJA TAHUN 2019

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 :“**Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas**”,dengan 5 prioritas nasional tahun 2019 :

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melauai penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melauai pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari turut berkontribusi langsung terhadap prioritas nasional ke 1 (Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar), dan ke 3 (Peningkatan nilai tambah ekonomi melauai pertanian, industri dan jasa produktifsebagaimana table 10.

Selain prioritas nasional, masih terdapat beberapa kegiatan Ditjen PHPL yang tercatat sebagai bagian dari kegiatan tematik janji presiden, nawacita, resposif gender, mitigasi perubahan iklim tabel 9.

Tabel 9. Kegiatan ditjen PHPL yang mendukung kegiatan tematik

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TEMATIK			
			Nawa Cita	Janji Presiden	Pengarus-utamaan Gender	Mitigasi Perubahan Iklim
1	5397-Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	002-KPHP yang Beroperasi di Hutan Produksi			√	
2	5398-Peningkatan Usaha Hutan Produksi	001-Kayu Bulat yang Diproduksi Dari Hutan Alam				√
3	5398-Peningkatan Usaha Hutan Produksi	004-Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi				√
4	5400-Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	001-Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem				√
5	5400-Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	003-Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi				√
6	5401-Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	006-UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK	√			
7	5402-Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	002-KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat				√

Tabel 10. Kontribusi Direktorat Jenderal PHPL terhadap prioritas nasional tahun 2019.

NO	KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO-PN)
1	5398-Peningkatan Usaha Hutan Produksi	001-Kayu Bulat yang Diproduksi Dari Hutan Alam	6-Juta M3	03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
2	5398-Peningkatan Usaha Hutan Produksi	002-Kayu Bulat yang Diproduksi dari Hutan Tanaman	35-Juta M3	03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
3	5398-Peningkatan Usaha Hutan Produksi	003-Hutan di Kalimantan yang Dibangun Dengan Silvikultur Intensif	3000-Ha	03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
4	5399-Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan luran Kehutanan	001-PNBP dari Hutan Produksi	3.13-Triliyun Rupiah	03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
5	5400-Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	003-Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi	270000-Ton	03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

NO	KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO-PN)
6	5401-Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	001-Produk Kayu Olahan yang Berasal dari IUPHHK Bersertifikat Legalitas Kayu	30.8-Juta M3	03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	02-Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	04-Pengolahan Hasil Hutan
7	5401-Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	005-Ekspor Produk Industri Kehutanan	9.28-USD Miliar	03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	02-Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	04-Pengolahan Hasil Hutan
8	5401-Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	006-UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK	150-kelompok UMKM	03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	03-Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	05-Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Produk Kehutanan
9	5402-Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	002-KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat	130-KPHP	01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan	05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	02-Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Desa
10	5402-Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	002-KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat	50-KPHP	01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan	05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	02-Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Desa

Sejalan dengan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan usaha ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui perhutanan sosial, peningkatan investasi masyarakat termasuk pariwisata dan TORA.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis DAS melalui rehabilitasi DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan penegakan hukum.
3. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, restorasi gambut, dan perbaikan tata kelola kawasan untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

Prioritas Belanja Pemerintah dilakukan dalam rangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 dengan memacu investasi untuk memantapkan pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Upaya yang dilakukan antara lain berupa :

1. Perbaikan Kualitas Belanja.
2. Penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif
3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri
4. Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2018

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berkontribusi pada duadari lima Prioritas Nasional (PN) yaitu 1)PN-1, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; dan 2) PN-3,peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industry, pariwisata dan jasa produktif lainnya

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung prioritas nasional ini berupa Fasilitasi pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak melalui pengembangan usaha kolaboratif berupa kemitraan usaha KPHP dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan pembiayaan terhadap tenaga Bakti Rimbawan guna mendukung pengelolaan hutan secara lestari yang ditempatkan di tingkat tapak (KPH).

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 17 Undang- Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dipandang perlu membentuk wilayah pengelolaan hutan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan (KPH). Pembentukan KPHP bertujuan untuk menata kawasan hutan produksi dalam unit-unit kelestarian usaha yang rasional dan menguntungkan serta dapat menjamin tersedianya hasil hutan dan manfaat lainnya bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

Pembentukan Kelembagaan UPTD KPH sampai dengan Oktober 2018 sebanyak 211 UPTD KPH untuk 308 Unit KPHP dan 281 Unit KPHP telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk difasilitasi kegiatannya sesuai ketersediaan anggaran di Ditjen PHPL. Dari 281KPHP yang sudah ditetapkan, terdapat 119 unit KPHP yang telah disahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sebagai pedoman pembangunan KPH 10 tahun ke depan.

Keberadaan kawasan hutan tidak terlepas dari administrasi pemerintahan dan masyarakat, dimana terdapat desa maupun pemukiman di dalam dan di sekitar hutan. Pengelolaan hutan sudah seharusnya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdapat diwilayah kerja KPHP didorong untuk bermitra dengan KPH dalam suatu usaha ekonomi produktif.

Pembangunan usaha produktif KPHP yang bermitra dengan masyarakat dapat berupa Pengembangan kelembagaan kemitraan, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam usaha pemanfaatan hasil hutan, serta Pembangunan usaha pemanfaatan HHBK berupa pendampingan maupun pemberian bantuan sarana/prasarana usaha

produktif. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menopang kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka.

2. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya

Upaya Ditjen PHPL dalam mendukung prioritas nasional ini dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan iklim usaha sektor kehutanan di hulu maupun hilir. Peningkatan iklim usaha kehutanan diharapkan mampu menggerakkan bisnis sektor kehutanan yang akan mendukung pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi produk kehutanan, penciptaan lapangan kerja baru, dan diversifikasi produk industri kehutanan baik jasa maupun produk lainnya.

Pembangunan Usaha Kehutanan Sektor Hulu

Di sektor hulu, kegiatan yang dilakukan berupa upaya meningkatkan produksi kayu bulat dari hutan tanaman maupun hutan alam dan peningkatan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Di sektor hilir kegiatan yang dilakukan berupa upaya meningkatkan produksi kayu olahan bersertifikat legalitas kayu, fasilitasi sertifikasi legalitas kayu pada UMKM, dan peningkatan ekspor industri kehutanan. Diharapkan upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan Negara bukan pajak dari sektor kehutanan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan hutan produksi tahun 2019 diharapkan dapat menghasilkan kayu bulat sebesar 41 juta m³ (hutan alam ditargetkan 6 juta m³ dan hutan tanaman ditargetkan 35 juta m³), dan hasil hutan bukan kayu 270 ribu ton. Peningkatan produktifitas ini diharapkan mampu menggenjot PNBPN tahun 2019 dari hutan produksi sebesar 3,13 triliun yang bersumber dari penerimaan DR, PSDH dan Penerimaan lainnya yang sah.

Upaya peningkatan produksi kayu dan HHBK dari hutan produksi dimulai dengan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-HA/HT/HHBK. kontrol terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan

memegang peranan penting dalam peningkatan produksi usaha kehutanan. Bagaimana rencana yang sudah dibuat dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaku usaha kehutanan merupakan tantangan tersendiri. Disisi lain proses produksi juga perlu didukung kebijakan-kebijakan yang menciptakan kondusifitas dalam iklim investasi dan berusaha di sector kehutanan. Disinilah peran sesungguhnya Ditjen PHPL dalam membangun iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku usaha kehutanan (baik skala besar maupun menengah/kecil) melalui beberapa kebijakan, diantaranya mendorong penerapan *Reduce Impact Logging* (RIL/ pemanenan ramah lingkungan) dan Silvikultur Intensif (SILIN).

Penerapan RIL dalam praktek pemanenan pohon diharapkan mampu meningkatkan rendemen kayu bulat yang dihasilkan dari hutan alam dan meminimalisir kerusakan hutan yang disebabkan dari kegiatan eksploitasi hutan. Dari sisi pembinaan/pembangunan kembali hutan produksi, penerapan Silvikultur Intensif (SILIN) diyakini mampu meningkatkan kemampuan regenerasi hutan setelah kegiatan eksploitasi melalui penggunaan bibit unggul, rekayasa/manipulasi lingkungan dan pengendalian terhadap hama dan penyakit serta kebakaran.

Peningkatan produktifitas hutan produksi berupa kayu bulat dan HHBK, perlu diimbangi dengan kemudahan proses bisnis dalam peredaran hasil hutan guna meningkatkan PNBP. Tahun 2015, Ditjen PHPL mengembangkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) sebagai instrumen dalam penerapan kebijakan self assessment pemanfaatan hasil hutan oleh pelaku usaha. Dalam proses penatausahaan hasil hutan, peredaran peredaran hasil hutan dari sektor hulu ke hilir, dimulai dari pemberian barcode terhadap pohon yang akan ditebang dalam proses *cruising* (inventarisasi tegakan sebelum penebangan), penerbitan surat keterangan peredaran hasil hutan, sampai pembayaran kewajiban kepada Negara berupa PNBP dari sektor kehutanan.

Pasca pemberlakuan kebijakan self assesment yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016, dimana setiap transaksi dilaksanakan secara elektronik, diperlukan suatu penghubung dalam proses peredaran kayu

dengan pembayaran kewajiban kepada Negara. Untuk menjawab hal tersebut, dibangun SI-PNBP untuk menjembatani SIPUHH dengan aplikasi penerimaan negara (SIMPONI) yang dibangun kementerian keuangan, dengan tujuan setiap transaksi atas PNBP dari hasil hutan dapat termonitor dan tercatat dengan baik, sepat dan akurat untuk mengurangi potensi kehilangan PNBP dari sektor kehutanan. terdapat 2 (dua) manfaat besar yang diperoleh dengan kehadiran SI-PNBP, yaitu: 1) Penelusuran piutang menjadi lebih mudah dan akurat, dimana setiap transaksi (seperti penerbitan NTPN dan BPN) langsung tercatat di SI-PNBP; 2) Peningkatan pelayanan bagi pengguna yang melaksanakan SIPUHH, dimana pengguna dimudahkan dalam proses pembayaran PNBP (PSDH, DR, dll).

Dalam penerapan dan penggunaannya, SI-PNBP memerlukan pengembangan tersendiri guna melayani kebutuhan Wajib Bayar (WB) dalam melaksanakan kewajibannya. Disisi lain, ditjen PHPL juga terus berupaya untuk menambah ragam jenis PNBP dari sector kehutanan, antara lain dari HHBK dan jasa lingkungan, selain terus meng-*update* tharga patokan hasil hutan sebagai instrument kebijakan dalam pengenaan tarif PNBP atas seluruh hasil hutan yang berasal dari butan negara.

Pembangunan Usaha Kehutanan Sektor Hilir

Di sektor hilir atau industri pengolahan hasil hutan, upaya membangun kondusifitas usaha di sektor industri pengolahan hasil hutan dilakukan dengan memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis terutama terkait dengan peningkatan rendemen dari industry pengolahan hasil hutan dan fasilitasi sertifikasi legalitas kayu dalam membuka peluang pasar produk pengolahan hasil hutan. Sertifikasi legalitas kayu atas produk industri pengolahan hasil hutan merupakan tuntutan pasar internasional dan saat ini pasar kayu dalam negeri juga telah bergerak kepada penggunaan kayu olahan yang dihasilkan dari industri-industri pengolahan kayu bersertifikat. Disinilah peran pemerintah dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong kinerja industri pengolahan hasil hutan melalui sertifikasi legalitas hasil hutan. Peningkatan pelaku usaha yang memiliki sertifikat legalitas kayu, dengan sendirinya akan membuka pasar produk kayu olahan baik

nasional maupun internasional. Kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku (peningkatan rendemen) melalui peremajaan mesin-mesin dan mendorong diversifikasi bahan baku (kayu yang biasanya tidak diolah) dan produk yang dihasilkan.

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor P.84 tahun 2016, bahwa ekspor produk industry kehutanan wajib dilengkapi dengan dokumen V-legal yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikembangkan Ditjen PHPL dan terintegrasi dengan *Indonesian National Single Window* (INSW) secara elektronik melalui sistem INATRADE secara langsung. SILK merupakan system yang dibangun untuk mengelola dan memverifikasi informasi legalitas kayu untuk ekspor kayu dan produk industry kehutanan. Keberadaan SILK akan mempermudah proses bisnis ekspor hasil hutan sekaligus sebagai instrument dalam memonitor perdagangan kayu (ekspor/impor) industri kehutanan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai ekspor produk kayu yang bersertifikat legal dari Indonesia. Tahun 2013 ekspor kayu legal dari Indonesia menyumbang US\$ 6,067 milyar, tahun 2014 senilai US\$ 6,603 milyar, tahun 2015 senilai US\$ 9,858 milyar, tahun 2016 senilai US\$ 9,27 milyar, dan tahun 2017 senilai US\$ 10,98 milyar.

Disisi lain, pemberlakuan pemenuhan kewajiban memiliki sertifikat legalitas kayu dirasakan berat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah, dalam hal ini Ditjen PHPL, berupaya memberikan fasilitasi kepada pelaku UMKM untuk dapat bersaing dalam pemasaran produk hasil hutan bersertifikat melalui pembiayaan pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu bagi UMKM secara berkelompok sesuai Peraturan Menteri LHK nomor 30 tahun 2016. Fasilitasi sertifikasi tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis bagi kelompok UIIPHHK kapasitas s.d. 6.000 m³/tahun oleh staf dari Kementerian LHK, UPT Kementerian LHK maupun oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Tahun 2018 ditargetkan ditjen PHPL dapat mensertifikasi UMKM sebanyak 150 kelompok (setara 750 UMKM) dan tahun 2019 ditargetkan 400 kelompok UMKM (setara 2.000 UMKM) dapat difasilitasi sertifikasi SVLK.

Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi VLK bagi UMKM ini bertujuan untuk :

- 1) Membantu UMKM untuk memenuhi kriteria dan indikator verifikasi legalitas kayu;
- 2) Mengidentifikasi kelemahan UMKM dalam melaksanakan usaha;
- 3) Memperkuat kelembagaan dan kemandirian UMKM;
- 4) Memberikan bantuan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu bagi UMKM;
- 5) Meningkatkan produksi kayu bersertifikat legal;
- 6) Mendorong pertumbuhan ekspor produk kayu legal;
- 7) Meningkatkan taraf kehidupan pelaku usaha kecil dan menengah.

ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 2019

Tahun 2018, sesuai kebijakan nasional, Ditjen PHPL mendukung 2 (dua) program prioritas nasional, yaitu penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah dengan total pagu anggaran Rp. 88.5 Milyar sebagaimana table 11.

Tabel 11. Alokasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional Ditjen PHPL TA 2018

No	Output Prioritas Nasional	Target	Anggaran (Rp.1000,-)
1	Kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam	6 juta M ³	1.017.850
2	Kayu bulat yang diproduksi dari hutan tanaman	35 juta M ³	982.150
3	Hutan Kalimantan yang dibangun dengan sivikultur intensif	3.000 Ha	10.000.000
4	PNBP dari hutan produksi	Rp.3,13 T	1.316.079
5	Komoditas HHBK yang diproduksi di hutan produksi	270.000 Ton	1.400.000
6	Produk kayu olahan yang berasal dari IUIPHHK bersertifikat legalitas kayu	30,8 juta M ³	500.000
7	Ekspor Produk Industri Kehutanan	9,28 M USD	2.300.000
8	UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK	400 Klpk UMKM	20.000.000
9	Pengamanan kolaboratif KPHP bersama masyarakat	130 KPHP	38.489.900
10	Pengelolaan kolaboratif KPHP bersama masyarakat desa.	50 KPHP	12.500.000
JUMLAH			88.505.979

B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019

Direktorat Jenderal PHPL bertanggung jawab atas Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan. Sasaran program tersebut adalah :1) Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi; 2) Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara; dan 3) Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari.

Program ini bertujuan Meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan. Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi tolok ukur keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun.
2. Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun.
3. Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun.
4. Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun.

Tabel 12. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019
1.	Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi	Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun	450.000 Ha
2.	Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industry) pada devisa dan penerimaan negara	Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan Negara meningkat setiap tahun	Rp. 3,127 T + USD 9,28 M
3.	Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun	347 Unit 26 Unit

Sejalan dengan perkembangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menindaklanjuti Peraturan Menteri dimaksud dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.21/PHPL/SET/REN.3/10/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 -2019 meliputi :

1. Jumlah Kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan tahun 2019 sebanyak 133 KPHP;
2. Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 Trilyun;
3. Nilai ekspor produk industri kehutanan pada tahun 2019 sebesar Rp. USD 9,28 Milyar;
4. Jumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL bertambah 122 Unit pada 2019.

Tabel 13. Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019
1.	Peningkatan jumlah Kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan	133 Unit
2.	Peningkatan jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi	Rp. 3,127 T
3.	Peningkatan nilai ekspor produk industri kehutanan	USD 9,28 M
4	Peningkatan jumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL	122 Unit

Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan lebih lanjut diimplementasikan menjadi 7 (tujuh) kegiatan.

1. *Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.*

Sasaran dari kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi adalah Areal hutan produksi tertata dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan. Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/UNIT KEGIATAN	TARGET
001-Luas Hutan Produksi yang Siap Untuk Dimanfaatkan Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perhutanan Sosial	10 Juta Ha
051-Pemolaan Kawasan Hutan Produksi	
002-KPHP yang Beroperasi di Hutan Produksi	347 KPHP
051-Evaluasi Operasionalisasi KPHP yang Memproduksi Barang dan Jasa	
052-Peningkatan kapasitas SDM KPHP	
053-Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II	
054-Community-Focused Investment Address Deforestation and Forest Degradation Project, Forest Investment Program (FIP) I	
003-KPHP yang Menerapkan Prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	5 KPHP
051-Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan	
004-Unit Manajemen yang Memenuhi Syarat Untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di Hutan Produksi	2 Unit
051-Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Pemanfaatan Hutan KPHP	
951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
994-Layanan Perkantoran	1 Layanan

2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi

Sasaran dari kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Alam adalah 1) Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, 2) Meningkatnya pemanfaatan hutan produksi untuk mendukung pembangunan energi baru dan energi terbarukan, dan 3) Seluruh UPHHK-HA dan HT aktif beroperasi pada tahun 2019. Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Hutan Produksi (UHP). Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Hutan Produksi (UHP).

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan usaha Hutan Produksi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/UNIT KEGIATAN	TARGET
001-Kayu Bulat yang Diproduksi Dari Hutan Alam	6 Juta M3
051-Evaluasi Implementasi RKUPHHK-HA/RKTUPHHK-H/IPK/IPPKH/Kelola Sosial dan Produksi Kayu Bulat Hutan Alam pada Hutan Produksi	
052-Penyusunan Regulasi/Sosialisasi Kebijakan Implementasi Pemanenan Ramah Lingkungan/RIL dan penghitungan Karbon Hutan / RIL-C	
002-Kayu Bulat yang Diproduksi dari Hutan Tanaman	35 Juta M3
051-Evaluasi Implementasi RKUPHHK-HT	
052-Fasilitasi Peningkatan Kelola Produksi, Sosial, dan Lingkungan di wilayah KPHP	
003-Hutan di Kalimantan yang Dibangun Dengan Silvikultur Intensif	3 Ribu Ha
051-Evaluasi Penerapan SILIN	
004-Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi	20 Ribu Ha
051-Fasilitasi usaha pemanfaatan Hutan Tanaman untuk Bioenergi	
005-IUPHHK-HA yang Dievaluasi Kinerjanya	16 Unit
051-Evaluasi Kinerja IUPHHK-HA	
052-Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja IUPHHK-HA	
006-IUPHHK-HT yang Dievaluasi Kinerjanya	27 Unit
051-Evaluasi Kinerja IUPHHK-HT	
052-Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja IUPHHK-HT	
951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
994-Layanan Perkantoran	1 Layanan

3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK

Sasaran dari Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK adalah meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan. Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK.

Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/UNIT KEGIATAN	TARGET
001-Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem	100 Ribu Ha
051-Peningkatan Usaha Restorasi Ekosistem/Pemanfaatan Kawasan	
052-Penguatan Database Areal Restorasi Ekosistem / Pemanfaatan Kawasan	
053-Bimbingan Teknis Pengelolaan Restorasi Ekosistem / Pemanfaatan Kawasan	
054-Evaluasi Kinerja Unit Usaha	
002-Unit Usaha Jasa Lingkungan/Jasa Wisata di Hutan Produksi	2 Unit
051-Penyusunan dan Pembahasan NSPK terkait Usaha Jasa Lingkungan	
052-Penguatan Database Potensi Jasa Lingkungan di Hutan Produksi	
053-Bimbingan Teknis Jasa Lingkungan di Hutan Produksi	
054-Peningkatan Kinerja Usaha Jasa Lingkungan	
003-Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi	270 Ribu Ton
051-Peningkatan Usaha Hasil hutan Bukan Kayu (HHBK)	
052-Peningkatan Kinerja Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
994-Layanan Perkantoran	1 Layanan

4. Peningkatan Tertib Penatausahaan dan Iuran Kehutanan

Sasaran kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan adalah optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.

Tabel 17. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan dan Iuran Kehutanan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/UNIT KEGIATAN	TARGET
001-PNBP dari Hutan Produksi	3.13 Trilyun Rupiah
051-Penyusunan NSPK Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan PNBP	
052-Penyusunan/Revisi Peraturan Pelaksanaan GANIS Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	
053-Pengembangan SIPNBP dan SIGANISPHPL	
054-Optimalisasi PNBP	
002-Unit yang Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	275 Unit
051-Penyusunan NSPK Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
052-Pemeliharaan dan Pengembangan SI-PUHH	
053-Audit Kepatuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
994-Layanan Perkantoran	1 Layanan

5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

Sasaran kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan adalah meningkatnya investasi dan ekspor produk industri kehutanan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tabel 18. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/UNIT KEGIATAN	TARGET
001-Produk Kayu Olahan yang Berasal dari IUPHHK Bersertifikat Legalitas Kayu	30.8 Juta M3
051-Peningkatan Produksi Kayu Olahan	
002-Roadmap/Kajian Pengembangan Forest Based Cluster Industry	3 Unit
051-Kajian/Roadmap Forest Based Cluster Industry	
003-Investasi Industri Kehutanan	1.000 Milyar Rupiah
051-Penelaahan Permohonan IUIPHHK	
052-Pengawasan dan Pengendalian IPHHK	
004-Industri Primer Hasil Hutan yang Menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku Online	1.174 Unit
051-Pengelolaan Sistem Informasi RPBB	
052-Evaluasi Pemenuhan Bahan Baku dan Produk Industri	
005-Ekspor Produk Industri Kehutanan	9.28 USD Milyar
051-Pengelolaan sistem informasi legalitas kayu	
052-Pemantauan Ekspor/Impor Produk Kehutanan	
053-Fasilitasi Data dan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu	
054-Peningkatan Ekspor Produk Industri Kehutanan	
006-UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK	400 Klmpk UMKM
051-Inventarisasi UMKM dan Pembekalan SDM terkait Implementasi SVLK	
052-Bimbingan Teknis Implementasi SVLK	
053-Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi Usaha Kecil/IUPHHK	
054-Evaluasi Implementasi SVLK	
052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	
951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
994-Layanan Perkantoran	1 Layanan

6. *Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Tabel 19. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/UNIT KEGIATAN	TARGET
950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	78 Poin
051-Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	
052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	
053-Pengelolaan data dan informasi	
054-Pengelolaan keuangan	
056-Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	
057-Pengelolaan kepegawaian	
058-Pelayanan umum dan perlengkapan	
059-Pelayanan rumah tangga	
061-Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	
951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
994-Layanan Perkantoran	1 Layanan

7. *Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan*

Sasaran kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan adalah meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wil. I s/d XVI

Tabel 20. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/UNIT KEGIATAN	TARGET
002-KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat	130 KPHP
051-Bakti Rimbawan	
003-KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat	50 KPHP
051-Pengelolaan Kolaboratif KPHP Bersama Masyarakat	
004-Data dan informasi hutan produksi	16 Wilayah
051-Bintek Kerjasama Pemanfaatan dan Kemitraan Hutan Produksi	
052-Penyusunan data dan informasi perkembangan pemanfaatan hutan produksi	
053-Fasilitasi Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi	
005-Data dan informasi produksi dan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan	16 Wilayah
051-Bimbingan Teknis & Evaluasi Kinerja IUPHHK	
052-Penyusunan data dan informasi produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	
006-Data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	16 Wilayah
051-Penyusunan data dan informasi peredaran hasil hutan, iuran kehutanan serta harga pasar hasil hutan	
052-Bimbingan teknis dan penilaian kinerja serta pengembangan profesi tenaga teknis PHPL	
053-Evaluasi peredaran kayu dari hutan hak	
007-Data dan informasi industri primer hasil hutan	16 Wilayah
051-Penyusunan data dan informasi perkembangan Industri hasil hutan	
052-Bimbingan teknis dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan	
053-Implementasi VLK di Industri Hasil Hutan	
008-Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II	10 KPH
051-Penyiapan Dokumen Legal Terkait Persyaratan Operasionalisasi KPH	
052-Komite Konsultatif	

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/UNIT KEGIATAN	TARGET
053-Penyusunan/Review Rencana Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif	
054-Pemetaan Partisipatif	
055-Menyusun model penyelesaian serta melakukan mediasi para pihak dalam rangka penyelesaian konflik tenurial/konflik SDA di wilayah KPH	
056-Fasilitasi penyusunan rencana bisnis KPHP melalui proses yang partisipatif	
057-Mengembangkan Mekanisme Kemitraan Antara KPH, Masyarakat dan Sektor Usaha	
058-Pengembangan Komunikasi dan Desiminasi ke Sektor Swasta dan Masyarakat	
059-Pendampingan Pengembangan Status BLUD	
060-Pendampingan dukungan akses kredit FMU	
061-Pendampingan Pengelolaan Database dan Sistem Informasi / Pelatihan Pengelolaan Data Base	
062-Pendampingan Untuk Pelatih (Pelatihan/Training Workshop on communication and outreach activities)	
009-Community Focus Investment Address Deforestation And Forest Degradation Project Forest Investment Program (FIP) I	2 KPH
051-Training GIS dan analisis penutupan lahan untuk staf KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi	
970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	
052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	
053-Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	
054-Pengelolaan kepegawaian	
055-Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	
951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
994-Layanan Perkantoran	1 Layanan

C. Pembiayaan Tahun 2019

Dalam upaya menjabarkan kerangka kebijakan dan mencapai target-target indikator keberhasilan, Ditjen PHPL diberi amanah untuk melaksanakan “Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan” dan sesuai Surat Menteri LHK nomor S.349/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian LHK TA. 2019, alokasi Pagu Anggaran Ditjen PHPL sebesar Rp.265.005.339.000,- yang bersumber dari : 1) RM Rp.55.838.939.000,-; 2) PNBP : Rp.70.000.000.000,-; 3) HLN : Rp.14.468.551.000,-.

Adapun pagu per jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai : Rp.97.124.521.000,-
- b. Belanja Operasional : Rp.27.573.328.000,-
- c. Belanja Non Operasional : Rp.140.307.490.000,-

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan, alokasi pagu tersebut terdistribusi sesuai prioritas ke dalam 7 (tujuh) kegiatan sebagaimana Tabel 21.

Tabel 21. Alokasi Pagu Anggaran Ditjen PHPL per Kegiatan TA 2019

No	Kegiatan	Pagu Alokasi (RP.1000,-)
1	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	6.751.395
2	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	14.499.500
3	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi	4.351.773
4	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan luran Kehutanan	4.538.157
5	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	24.790.808
6	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	156.074.871
7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL	53.998.835
	JUMLAH	265.005.339

ANGGARAN HIBAH LUAR NEGERI

Tahun 2019, Ditjen PHPL terdapat anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp. 14.468.551.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II dengan pagu anggaran Rp. 12.100.000.000 yang tersebar ke dalam 9 Satker (Direktorat KPHP dan 8 BPHP)
2. Community-Focused Investment Address Deforestation and Forest Degradation Project, Forest Investment Program (FIP) I dengan pagu anggaran Rp. 2.368.551.000,- yang terbagi kedalam 2 Satker (Direktorat KPHP dan BPHP Wil VIII Pontianak)

IV. PENUTUP

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kehutanan tahun 2019, Pembangunan hutan produksi diarahkan untuk mencapai target-target Prioritas Nasional maupun Prioritas Bidang. Pendekatan pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek meliputi aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Keberhasilan pengelolaan hutan produksi dari aspek ekonomi akan mampu mempertahankan potensi sumber daya hutan yang stabil dengan nilai ekonomi dan financial yang semakin meningkat. Dari aspek ekologi, meningkatkan perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan. Sementara aspek sosial memiunkinkan adanya interaksi positif keberadaan pengelolaan hutan dengan masyarakat dalam rangka perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

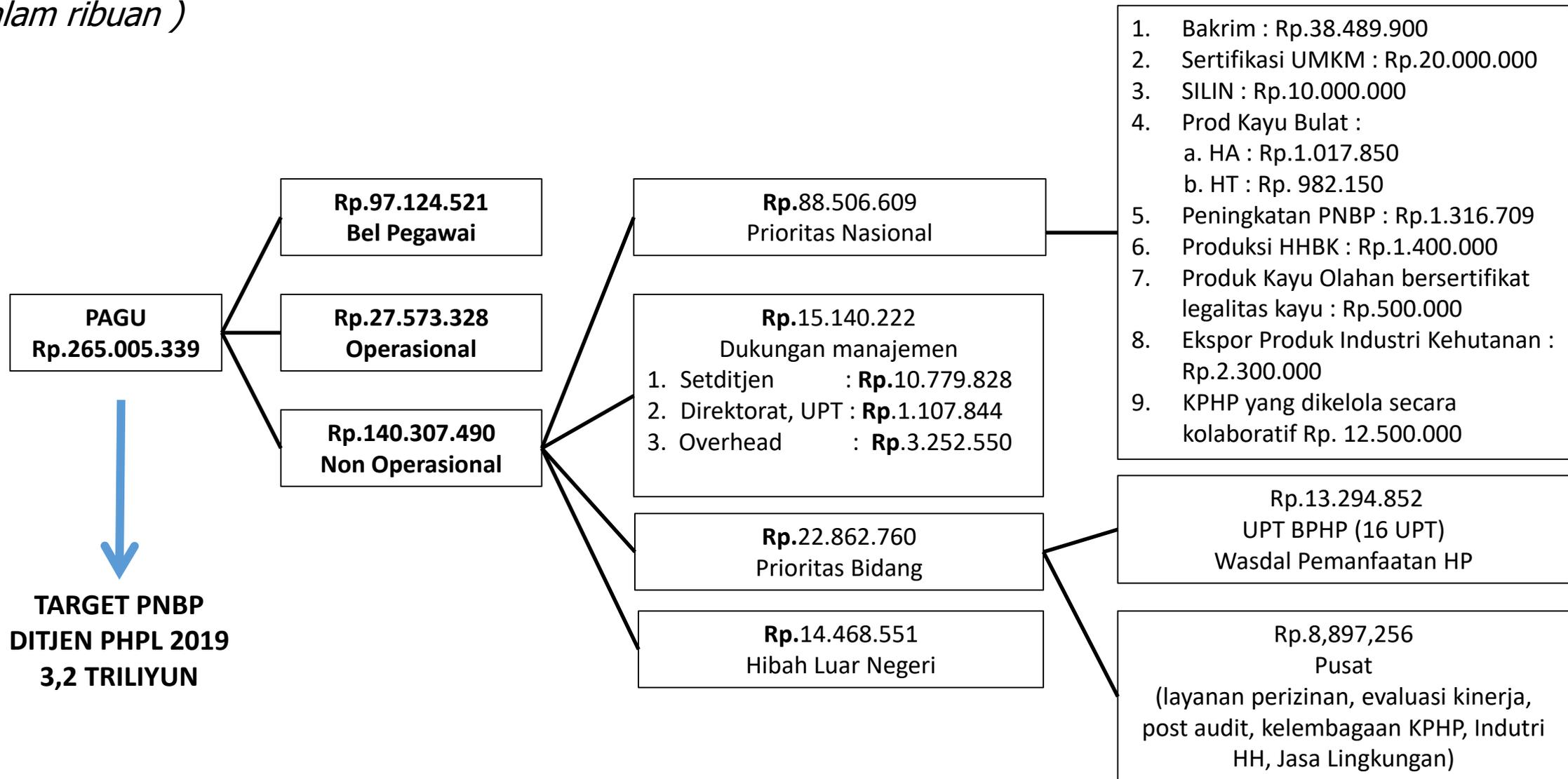
Rencana kerja Ditjen PHPL Tahun 2019 diharapkan mampu menjawab isu-isu dan tantangan dalam pengelolaan Hutan Produksi, yang sekaligus mampu menjadi dasar pijakan dalam penyusunan Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2020 – 2024. Isu konflik lahan (tenurial), illegal logging, tingginya jumlah desa miskin di sekitar dan dalam kawasan hutan, kepastian kawasan (perubahan tata ruang), hambatan pemasaran hasil hutan dalam negeri, praktek ekonomi biaya tinggi dan situasi ekonomi global menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan hutan produksi kedepan. Disisi lain sektor kehutanan juga memiliki beberapa peluang dan nilai yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan peran pemerintah dan komitmen para pihak serta modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme kemitraan/kerjasama.

Dengan adanya Rencana Kerja Ditjen PHPL ini,seluruh jajaran Ditjen PHPL dan para pihak dapat lebih fokus dan konsisten melaksanakan kebijakan pengelolaan hutan produksi tahun 2019.keberhasilan implementasi Rencana Kerja ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan Direktorat Jenderal PHPL, serta dukungan swasta dan masyarakat. Dengan kerja keras dan berkomitmen berbagai pihak, sasaran dan tujuan Ditjen PHPL akan dapat terwujud.

LAMPIRAN

MATRIK STRUKTUR ANGGARAN DITJEN PHPL TA 2019

(dalam ribuan)



RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PAGU ANGGARAN TAHUN 2019
BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
(JUTA RUPIAH)

BA : 029
K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT PRIORITAS	MENJADI (ALOKASI HASIL RAKER-RDP DPR)			BIDANG RPJMN 2015-2019	TEMATIK/NAWACITA/JANJI PRESIDEN
		TARGET	SATUAN	ALOKASI		
029.06	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan			140,307	50,000.000	
029.06.5396	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari			12,289.8		
029.06.5396.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	10,779.8	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5396.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	1,510.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5397	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi			5,560.9		
029.06.5397.001	Luas Hutan Produksi yang Siap untuk dimanfaatkan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan Perhutanan Sosial	10	Juta Ha	526.4	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5397.002	KPHP yang beroperasi di hutan produksi	347	Unit	3,436.2	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	003 - Anggaran Responsif Gender
029.06.5397.003	KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari	5	KPHP	336.1	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5397.004	Unit manajemen yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi	2	unit	1,036.6	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5397.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	75.6	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5397.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	150.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi			13,398.9		
029.06.5398.001	Kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam	6	juta m3	1,017.9	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan iklim
029.06.5398.002	Kayu bulat yang diproduksi dari hutan tanaman	35	juta m3	982.2	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5398.003	Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan Silvikultur Intensif	3,000	Ha	10,000.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-

BA : 029
K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT PRIORITAS	MENJADI (ALOKASI HASIL RAKER-RDP DPR)			BIDANG RPJMN 2015-2019	TEMATIK/NAWACITA/JANJI PRESIDEN
		TARGET	SATUAN	ALOKASI		
029.06.5398.004	Usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	20,000	Ha	81.4	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim
029.06.5398.005	IUPHHK HA yang dievaluasi kinerjanya	16	unit	598.6	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5398.006	IUPHHK-HT yang dievaluasi kinerjanya	27	unit	705.7	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5398.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	13.2	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5398.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	0.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5399	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan			3,319.6		
029.06.5399.001	PNBP dari Hutan Produksi	3.13	Triliun Rupiah	1,316.7	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5399.002	Unit yang tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	275	unit	1,987.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5399.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	15.8	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5399.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	0.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5400	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			3,731.2		
029.06.5400.001	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem	100,000	hektar	990.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim
029.06.5400.002	Unit usaha jasa lingkungan/jasa wisata di hutan produksi	2	unit	1,014.8	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5400.003	Komoditas HHBK yang diproduksi di hutan produksi	270,000	ton	1,400.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim
029.04.5400.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	26.4	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5400.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	300.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan			23,859.9		
029.06.5401.001	Produk kayu olahan yang berasal dari IUPHHK yang bersertifikat legalitas kayu	30.8	juta m3	500.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5401.002	Roadmap/kajian pengembangan Forest Based Cluster industry	3	unit	600.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5401.003	Investasi industri kehutanan	1,000	Miliar Rupiah	336.8	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5401.004	Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online	1,174	unit	109.9	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5401.005	Ekspor Produk Industri Kehutanan	9.28	USD Miliar	2,300.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5401.006	UMKM Yang Difasilitasi Sertifikasi SVLK	400	Kelompok UMKM	20,000.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5400.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	13.2		
029.04.5401.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	0.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5402	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan			78,147.2		
029.06.5402.002	KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat	130	KPHP	38,489.9	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim
029.06.5402.003	KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat	50	KPHP	12,500.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim

BA : 029
 K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT PRIORITAS	MENJADI (ALOKASI HASIL RAKER-RDP DPR)			BIDANG RPJMN 2015-2019	TEMATIK/NAWACITA/JANJI PRESIDEN
		TARGET	SATUAN	ALOKASI		
029.06.5402.004	Data dan informasi hutan produksi	16	wilayah	4,311.6	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5402.005	Produksi dan Kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan	16	wilayah	4,621.6	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5402.006	Data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	16	wilayah	2,835.8	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5402.007	Data dan informasi industri primer hasil hutan	16	wilayah	1,525.7	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5402.008	Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II	10	KPH	10,000.0	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.06.5402.009	Community Focus Investment Address Deforestation And Forest Degradation Project Forest Investment Program (FIP) I	2	KPHP	1,606.2	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5402.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	1,292.6	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
029.04.5402.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	963.7	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
JUMLAH				140,307.5		

RINCIAN PROYEK PRIORITAS PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019
BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
(JUTA RUPIAH)

BA : 029
K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK PRIORITAS	MENJADI (ALOKASI HASIL RAKER-RDP DPR)				PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
		TARGET	SATUAN	ALOKASI	LOKASI				
029.06	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan			88,506.6	32,889.2				
029.06.5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi			12,000.0					
029.06.5398.001	Kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam	6	juta m3	1,017.9	Pusat	Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu	Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
029.06.5398.002	Kayu Bulat yang Diproduksi dari Hutan Tanaman	35	juta m3	982.2	Pusat	Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu	Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
029.06.5398.003	Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan Silvikultur Intensif	3,000	Ha	10,000.0	Pusat	Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu	Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
029.06.5399	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan			1,316.7					
029.06.5399.001	PNBP dari Hutan Produksi	3	Rupiah Triliun	1,316.7	Pusat	Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu	Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
029.06.5400	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			1,400.0					
029.06.5400.003	Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi	270,000	ton	1,400.0	Pusat	Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu	Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
029.06.5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan			22,800.0					
029.06.5401.001	Produk Kayu Olahan yang Berasal dari IUPHHK Bersertifikat Legalitas Kayu	31	juta m3	500.0	Pusat	Pengolahan Hasil Hutan	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian,	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
029.06.5401.005	Ekspor Produk Industri Kehutanan	9	USD Miliar	2,300.0	Pusat	Pengolahan Hasil Hutan	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian,	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
029.06.5401.006	UMKM Yang Difasilitasi Sertifikasi SVLK	400	Kelompok UMKM	20,000.0	Pusat	Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Produk Kehutanan	Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
029.06.5402	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan			50,989.9					
029.06.5402.002	KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat	130	KPHP	38,489.9	KPHP	Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Hutan Bersama	Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan
029.06.5402.003	KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat	50	KPHP	12,500.0	KPHP	Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Hutan Bersama	Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan
JUMLAH				88,506.6					

Keterangan :

Bersifat indikasi untuk selanjutnya dikonfirmasi dan dimutakhirkan dalam proses perencanaan dan penganggaran hingga penetapan APBN 2019

MATRIK PAGU ALOKASI ANGGARAN DITJEN PHPL TAHUN 2019

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	ANGGARAN
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan		265,005,339
I	5396-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari		53,998,835
	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	78 Poin	10,779,828
	051-Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran		1,890,149
	052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		875,500
	053-Pengelolaan data dan informasi		785,000
	054-Pengelolaan keuangan		710,280
	056-Pelayanan hukum dan kepatuhan internal		2,977,410
	057-Pengelolaan kepegawaian		1,681,726
	058-Pelayanan umum dan perlengkapan		1,177,825
	059-Pelayanan rumah tangga		369,738
	061-Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		312,200
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1,510,000
	051-Pengadaan kendaraan bermotor		955,000
	052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		320,250
	053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		-
	054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		234,750
	055-Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		-
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	41,709,007
	001-Gaji dan Tunjangan		38,053,363
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		3,655,644
II	5397-Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi		6,751,395
	001-Luas Hutan Produksi yang Siap Untuk Dimanfaatkan Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perhutanan Sosial	10 Juta Ha	526,425
	051-Pemolaan Kawasan Hutan Produksi		526,425
	002-KPHP yang Beroperasi di Hutan Produksi	347 KPHP	3,436,163
	051-Evaluasi Operasionalisasi KPHP yang Memproduksi Barang dan Jasa		172,500
	052-Peningkatan kapasitas SDM KPHP		401,312
	053-Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II		2,100,000
	054-Community-Focused Investment Address Deforestation and Forest Degradation Project, Forest Investment Program (FIP) I		762,351
	003-KPHP yang Menerapkan Prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	5 KPHP	336,137
	051-Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan		336,137
	004-Unit Manajemen yang Memenuhi Syarat Untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di Hutan Produksi	2 Unit	1,036,610
	051-Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Pemanfaatan Hutan KPHP		1,036,610
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	150,000
	051-Pengadaan kendaraan bermotor		-
	052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		150,000
	053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		-
	054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		-
	055-Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		-
	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	75,550
	051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		-
	052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		75,550
	053-Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		-
	054-Pengelolaan kepegawaian		-
	055-Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		-
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1,190,510
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1,190,510

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	ANGGARAN
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan		265,005,339
III	5398-Peningkatan Usaha Hutan Produksi		14,499,500
	001-Kayu Bulat yang Diproduksi Dari Hutan Alam	6 Juta M3	1,017,850
	051-Evaluasi Implementasi RKUPHHK-HA/RKTUPHHK-H/IPK/IPPKH/Kelola Sosial dan Produksi Kayu Bulat Hutan Alam pada Hutan Produksi		474,050
	052-Penyusunan Regulasi/Sosialisasi Kebijakan Implementasi Pemanenan Ramah Lingkungan/RIL dan penghitungan Karbon Hutan / RIL-C		543,800
	002-Kayu Bulat yang Diproduksi dari Hutan Tanaman	35 Juta M3	982,150
	051-Evaluasi Implementasi RKUPHHK-HT		574,000
	052-Fasilitasi Peningkatan Kelola Produksi, Sosial, dan Lingkungan di wilayah KPHP		408,150
	003-Hutan di Kalimantan yang Dibangun Dengan Silvikultur Intensif	3 Ribu Ha	10,000,000
	051-Evaluasi Penerapan SILIN		10,000,000
	004-Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi	20 Ribu Ha	81,375
	051-Fasilitasi usaha pemanfaatan Hutan Tanaman untuk Bioenergi		81,375
	005-IUPHHK-HA yang Dievaluasi Kinerjanya	16 Unit	598,590
	051-Evaluasi Kinerja IUPHHK-HA		528,470
	052-Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja IUPHHK-HA		70,120
	006-IUPHHK-HT yang Dievaluasi Kinerjanya	27 Unit	705,746
	051-Evaluasi Kinerja IUPHHK-HT		562,046
	052-Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja IUPHHK-HT		143,700
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal		-
	051-Pengadaan kendaraan bermotor		-
	052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		-
	053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		-
	054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		-
	055-Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		-
	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	13,200
	051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		-
	052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		13,200
	053-Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		-
	054-Pengelolaan kepegawaian		-
	055-Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		-
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1,100,589
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1,100,589
IV	5399-Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan		4,351,773
	001-PNBP dari Hutan Produksi	3.13 Trilyun Rupiah	1,316,709
	051-Penyusunan NSPK Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan PNBP		152,352
	052-Penyusunan/Revisi Peraturan Pelaksanaan GANIS Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan		230,500
	053-Pengembangan SIPNBP dan SIGANISPHPL		513,076
	054-Optimalisasi PNBP		420,781
	002-Unit yang Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	275 Unit	1,987,031
	051-Penyusunan NSPK Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan		225,820
	052-Pemeliharaan dan Pengembangan SI-PUHH		1,118,516
	053-Audit Kepatuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan		642,695
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-
	051-Pengadaan kendaraan bermotor		-
	052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		-
	053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		-
	054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		-
	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	15,835
	051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		-
	052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		15,835
	053-Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		-
	054-Pengelolaan kepegawaian		-

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	ANGGARAN
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan		265,005,339
	055-Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		-
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1,032,198
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1,032,198
V	5400-Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		4,538,157
	001-Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem	100 Ribu Ha	990,005
	051-Peningkatan Usaha Restorasi Ekosistem/Pemanfaatan Kawasan		310,035
	052-Penguatan Database Areal Restorasi Ekosistem / Pemanfaatan Kawasan		418,650
	053-Bimbingan Teknis Pengelolaan Restorasi Ekosistem / Pemanfaatan Kawasan		134,140
	054-Evaluasi Kinerja Unit Usaha		127,180
	002-Unit Usaha Jasa Lingkungan/Jasa Wisata di Hutan Produksi	2 Unit	1,014,795
	051-Penyusunan dan Pembahasan NSPK terkait Usaha Jasa Lingkungan		81,280
	052-Penguatan Database Potensi Jasa Lingkungan di Hutan Produksi		270,690
	053-Bimbingan Teknis Jasa Lingkungan di Hutan Produksi		321,010
	054-Peningkatan Kinerja Usaha Jasa Lingkungan		341,815
	003-Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi	270 Ribu Ton	1,400,000
	051-Peningkatan Usaha Hasil hutan Bukan Kayu (HHBK)		1,099,060
	052-Peningkatan Kinerja Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		300,940
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	300,000
	051-Pengadaan kendaraan bermotor		-
	052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		300,000
	053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		-
	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	26,400
	051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		-
	052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		26,400
	053-Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		-
	054-Pengelolaan kepegawaian		-
	055-Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		-
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	806,957
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		806,957
VI	5401-Peningkatan Usaha Industri Kehutanan		24,790,808
	001-Produk Kayu Olahan yang Berasal dari IUPHHK Bersertifikat Legalitas Kayu	30.8 Juta M3	500,000
	051-Peningkatan Produksi Kayu Olahan		500,000
	002-Roadmap/Kajian Pengembangan Forest Based Cluster Industry	3 Unit	600,000
	051-Kajian/Roadmap Forest Based Cluster Industry		600,000
	003-Investasi Industri Kehutanan	1000 Milyar Rupiah	336,800
	051-Penelaahan Permohonan IUIPHHK		166,470
	052-Pengawasan dan Pengendalian IPHHK		170,330
	004-Industri Primer Hasil Hutan yang Menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku Online	1174 Unit	109,930
	051-Pengelolaan Sistem Informasi RPBB		65,690
	052-Evaluasi Pemenuhan Bahan Baku dan Produk Industri		44,240
	005-Ekspor Produk Industri Kehutanan	9.28 USD Milyar	2,300,000
	051-Pengelolaan sistem informasi legalitas kayu		1,216,770
	052-Pemantauan Ekspor/Impor Produk Kehutanan		408,600
	053-Fasilitasi Data dan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu		81,000
	054-Peningkatan Ekspor Produk Industri Kehutanan		593,630
	006-UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK	400 Kelompok UMKM	20,000,000
	051-Inventarisasi UMKM dan Pembekalan SDM terkait Implementasi SVLK		664,980
	052-Bimbingan Teknis Implementasi SVLK		2,929,900
	053-Sertifikasi Legalitas Kau Bagi Usaha Kecil/IUPHHK		15,544,100
	054-Evaluasi Implementasi SVLK		861,020

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	ANGGARAN
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan		265,005,339
	052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		-
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-
	007-Peralatan dan Mesin		-
	008-Gedung dan Bangunan		-
	009-Data dan Informasi		-
	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	13,200
	051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		-
	052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		13,200
	053-Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		-
	054-Pengelolaan kepegawaian		-
	055-Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		-
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	930,878
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		930,878
VII	5402-Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan		156,074,871
	002-KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat	130 KPHP	38,489,900
	051-Bakti Rimbawan		38,489,900
	003-KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat	50 KPHP	12,500,000
	051-Pengelolaan Kolaboratif KPHP Bersama Masyarakat		12,500,000
	004-Data dan informasi hutan produksi	16 Wilayah	4,311,635
	051-Bintek Kerjasama Pemanfaatan dan Kemitraan Hutan Produksi		213,550
	052-Penyusunan data dan informasi perkembangan pemanfaatan hutan produksi		2,433,790
	053-Fasilitasi Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi		1,664,295
	005-Data dan informasi produksi dan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan	16 Wilayah	4,621,635
	051-Bimbingan Teknis & Evaluasi Kinerja IUPHHK		3,702,701
	052-Penyusunan data dan informasi produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu		918,934
	006-Data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	16 Wilayah	2,835,837
	051-Penyusunan data dan informasi peredaran hasil hutan, iuran kehutanan serta harga pasar hasil hutan		1,035,621
	052-Bimbingan teknis dan penilaian kinerja serta pengembangan profesi tenaga teknis PHPL		1,608,966
	053-Evaluasi peredaran kayu dari hutan hak		191,250
	007-Data dan informasi industri primer hasil hutan	16 Wilayah	1,525,745
	051-Penyusunan data dan informasi perkembangan Industri hasil hutan		214,660
	052-Bimbingan teknis dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan		1,274,335
	053-Implementasi VLK di Industri Hasil Hutan		36,750
	008-Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II	10 KPH	10,000,000
	051-Penyiapan Dokumen Legal Terkait Persyaratan Operasionalisasi KPH		657,804
	052-Komite Konsultatif		718,680
	053-Penyusunan/Review Rencana Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif		937,863
	054-Pemetaan Partisipatif		551,803
	055-Menyusun model penyelesaian serta melakukan mediasi para pihak dalam rangka penyelesaian konflik tenurial/konflik SDA di wilayah KPH		2,149,909
	056-Fasilitasi penyusunan rencana bisnis KPHP melalui proses yang partisipatif		549,554
	057-Mengembangkan Mekanisme Kemitraan Antara KPH, Masyarakat dan Sektor Usaha		535,801
	058-Pengembangan Komunikasi dan Desiminasi ke Sektor Swasta dan Masyarakat		575,745
	059-Pendampingan Pengembangan Status BLUD		1,285,607
	060-Pendampingan dukungan akses kredit FMU		1,495,174
	061-Pendampingan Pengelolaan Database dan Sistem Informasi / Pelatihan Pengelolaan Data Base		271,030
	062-Pendampingan Untuk Pelatih (Pelatihan/Training Workshop on communication and outreach activities)		271,030

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	ANGGARAN
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan		265,005,339
	009-Community Focus Investment Address Deforestation And Forest Degradation Project Forest Investment Program (FIP) I	2 KPH	1,606,200
	051-Training GIS dan analisis penutupan lahan untuk staf KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi		1,606,200
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1,292,550
	051-Pengadaan kendaraan bermotor		296,000
	052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		377,800
	053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		396,250
	054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		222,500
	055-Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		-
	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	963,659
	051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		612,135
	052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		100,650
	053-Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		227,174
	054-Pengelolaan kepegawaian		-
	055-Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		23,700
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	77,927,710
	001-Gaji dan Tunjangan		59,071,158
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		18,856,552